



EVALUASI PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 DENGAN KURIKULUM MERDEKA

Ucok Setia Siregar¹⁾

¹⁾Sekolah Dasar 17 Karang Endah Kepahiang,
setiasiregarucok@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Penerapan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka memiliki perbedaan dengan adanya kendala maka munculah kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi peroses pembelajaran. Berdasarkan pada kajian literatur yang telah dilakukan, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dikenal dengan kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini meliputi 4 hal: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; Ujian Nasional (UN) berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter; kebebasan pendidik untuk mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan Merdeka Belajar memiliki karakteristik yang menekankan pada kreativitas, orientasi pembelajaran pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Hal ini berdampak pada kebutuhan pengembangan evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci: Evaluasi Pembelajaran, Kurikulum Merdeka

ABSTRACT

The implementation of the 2013 Curriculum with the Independent Curriculum has a difference in the presence of obstacles, so that the obstacles encountered affect the learning process. Based on the literature review that has been conducted, the policy of the Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, is known as the Freedom to Learn policy. This policy includes 4 things: The National Standardized School Examination (USBN) is developed by each school; National Examination (UN) changed to Minimum Competency Assessment (AKM) and Character Survey; the freedom of educators to design Learning Implementation Plans (RPP); and flexibility in New Student Admissions (PPDB). The Freedom to Learn Policy has characteristics that emphasize creativity, learning orientation on problem solving, learning based on the demands of society and the world of work, as well as a comprehensive assessment system. This has an impact on the need for the development of learning evaluation.

Keywords: Learning Evaluation, Independent Curriculum

1. PENDAHULUAN

Sejatinya pendidikan formal evaluasi begitu penting keberadaanya, dengan adanya evaluasi guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar, begitupun pentingnya dalam evaluasi pembelajaran. Sedangkan pengembangan kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim selaku mendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep Merdeka

Belajar yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidikan. Nadiem juga memberikan kritikan kepada lembaga pendidikan saat ini yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri (Madhakomala et al., 2022).

Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan dilembaganya. Diantara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian Nasional (UN) berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Madhakomala et al., 2022). Kebijakan visioner Kemendikbud yang menggebrak paradigma kurikulum lama ini menarik untuk dikaji, maka dari itu penulis berupaya mendiskusikan analisa terkait evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dengan demikian peneliti ingin menciptakan pustaka baru untuk melihat perbandingan evaluasi yang ada pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka saat ini (Aprima & Sari, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah menetapkan Standar Isi untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai tujuan pendidikan Nasional. Standar Isi tersebut menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan untuk mengetahui ruang lingkup bahan atau materi yang harus disampaikan. Disamping itu, menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kompetensi para peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai jenjang dan sesuai jenis pendidikan yang ditempuh. Setiap kompetensi yang diharapkan pada peraturan pemerintah berimplikasi terhadap proses pembelajaran dan assesmen yang diharapkan (Permendikbud, 2016).

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak telah mengalami sebelas kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa prakemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana, dan masa kemerdekaan yang terus menerus disempurnakan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan tahun 2013.



Gambar 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif (Jono, 2016). Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan dipandang bagus atau sempurna pada zamannya, dan akan menjadi tidak relevan pada zaman-zaman berikutnya (Alhamuddin, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Penulisan mengumpulkan sejumlah referensi tentang analisis evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka baik itu jurnal, maupun dokumen Peraturan Pemerintah yang terkait referensi tersebut dikaji secara seksama untuk memperoleh penjelasan yang rinci terkait penilaian dan evaluasi pendidikan mengacu pada kajian tersebut, peneliti kemudian merumuskan pandangannya mengenai pelaksanaan penilaian di sekolah atau madrasah yang meliputi analisis evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Proses penelitian dilakukan dengan mengambil studi pustaka dari literatur, buku-buku, maupun dari internet. Kemudian dilakukan telaah dan kajian yang relevan dengan penelitian. Untuk membahas hasil penelitian dilakukan deskripsi dengan mengaitkan dari literatur, buku-buku maupun dari internet. Selanjutnya membuat kesimpulan hasil penelitian yang telah diupayakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini (Agusta et al., 2022).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kurikulum Merdeka

Salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Nadiem Makarim adalah Merdeka Belajar yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan merdeka belajar adalah agar guru, siswa dan orang tua dapat memiliki suasana yang menyenangkan. Merdeka belajar berarti proses pendidikan harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Bahagia untuk siapa? Bahagia untuk guru, bahagia untuk siswa, bahagia untuk orang tua, dan bahagia untuk semua orang. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsep Merdeka Belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka (Marisa, 2021).

Merdeka belajar dapat dipahami sebagai merdeka berpikir, merdeka berkarya, dan menghormati atau merespons perubahan yang terjadi (memiliki daya suai). Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang (Nasution, 2022).

Nadiem Makarim terdorong untuk melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa membebani pendidik ataupun peserta didik dengan harus memiliki ketercapaian tinggi berupa skor atau kriteria ketuntasan minimal. Oleh karena itu, terkait kebijakan baru hal ini dipaparkan oleh Nadiem Makarim kepada para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, 11 Desember 2019. Dengan demikian, Nadiem memaparkan empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yakni (Ineu et al., 2022):

1. Ujian Nasional (UN) yang akan ditiadakan dan diganti dengan Assesment Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dalam literasi dan numerik yang didasari dengan praktik terbaik tes PISA. Hal ini tentu berbeda dengan UN yang dijadwalkan akan terlaksana pada akhir jenjang pendidikan. Namun, Assesment dilaksanakan di tingkat kelas IV, VIII, dan XI. Dari sistem penilaian yang telah dilakukan inovasi ini, tentu memiliki harapan bahwa pada hasilnya dapat memberi masukan bagi

sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

2. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim mengatakan, RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Tidak hanya itu, penyederhanaan administrasi diharapkan para pendidikan mampu mengalihkan kegiatan belajar dengan capaian meningkatkan kompetensi.
3. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terkait kebijakan ini bahwa USBN diserahkan seutuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis serta bentuk penugasan lainnya.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait kebijakan PPDB lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, bahwa peserta didik yang memalui jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasi.

Dari penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini dalam kita lihat ada upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi setiap keresahan yang ada terutama pro-kontra selama ini tentang Ujian Nasional (UN) sebagai alat Evaluasi Penilaian di sekolah, namun upaya ini tidak cukup dengan narasi saja, perlu penyepakatan yang lebih jauh dari semua pihak agar rencana besar ini dapat diwujudkan. Terutama kesiapan infrastruktur menjadi kendala yang utama di beberapa sekolah di Indonesia. Menyikapi hal ini, menurut kami, tes evaluasi peminatan memang menjadi kunci dalam memaknai merdeka belajar, karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus diakhirnya dengan format penilaian yang jelas yang ditentukan oleh pemerintah, tes evaluasi peminatan ini adalah suatu format yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik guna melihat minat dan bakat peserta didik sejak dini, dan akan kemana nantinya.

B. Evaluasi Kurikulum Merdeka

Sebelum suatu kurikulum diberlakukan secara nasional, diperlukan adanya fase pengembangan di mana kurikulum yang baru tersebut dirancang dengan cermat dan diujicobakan dalam lingkungan terbatas, sebelum akhirnya diputuskan untuk disebarluaskan ke semua lembaga pendidikan. Ada juga yang menyebutkan fase ini sebagai fase perintisan (pilot study). Berbagai upaya perlu dilakukan selama fase pengembangan, termasuk ke dalamnya evaluasi dan perbaikan. Melalui fase pengembangan, kurikulum yang baru tersebut akan

disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan hasil evaluasi, sebelum diberlakukan dalam sistem yang ada. Uraian singkat di atas mengimplikasikan pentingnya fase ini dalam keseluruhan kegiatan pengembangan kurikulum. Evaluasi yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya fase pengembangan ini dengan efektif dan bermakna. Dari hasil-hasil evaluasi ini lah pihak pengembang dapat mengadakan perbaikan dan penyesuaian sebelum kurikulum yang baru tersebut terlanjur disebar luaskan secara nasional (Kurniati et al., 2022).

Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Bagian-bagian berikut dari modul ini akan difokuskan pada uraian tentang evaluasi dalam fase pengembangan kurikulum tujuannya, berbagai konsep/model evaluasi yang pernah dikembangkan, tinjauan masing-masing konsep/model, dan akhirnya model evaluasi yang disarankan. Sebagai seorang guru Anda tentunya harus memahami betul mengapa suatu kurikulum harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum (Firdaus et al., 2022).

Proses evaluasi penilaian inilah yang perlu kita mulai dengan mengklasifikasi di setiap tingkatan kelas dan kemudian melibatkan lapisan masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Diantaranya sekolah melibatkan guru spesialisasi guna lebih menjangkau peminatan peserta didik tersebut sejak kelas 4 jika di Sekolah Dasar, Kelas 8 di Sekolah Menengah Pertama dan Kelas 11 di Sekolah Menengah Atas. Terutama proses peminatan di Sekolah Menengah Atas menjadi Perhatian besar bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Sekolah terkait dalam mengambil keputusan tentunya melibatkan peserta didik sebagai subjeknya (Izza et al., 2020).

Minat dan Bakat peserta didik tidak dapat lepas dari seberapa besar penyerapan ilmu yang diterima oleh peserta didik tersebut di semua jenjang sekolah, seberapa perbandingan teori dan praktik di lapangan dan kekhsusuan ilmu yang diterapkan. Semisal kita contohkan pembagian 50% teori dan 50% praktik dalam setiap pelajaran yang ada di sekolah sehingga peserta didik dapat langsung menyerap ilmu yang telah diajarkan kepada meraka. Seperti halnya sekolah menengah atas, sekolah kejuruan pun dewasa ini mempunyai keresahan yang sama, semisal; menduga lulusan SMK yang ada tidak dapat bersaing dalam dunia kerja dengan kemampuannya yang dianggap setengah-setengah, bahkan masih banyak lulusan SMK yang menganggur, ada juga fenomena lulusan SMK jurusan tertentu malah melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan yang berbeda. Kontradiksi ini terus kita dengar dan temui begitu juga terus menjadi pembiaran saja. Sehingga, setiap tahunnya, tumpukan-tumpukan pengangguran dan polemik ini datang tiada henti (Izza et al., 2020).

Evaluasi penilaian tidak lepas dari proses penentuan minat yang telah dijelaskan tadi, tentu Pemerintah Pusat, Daerah. Sekolah bersangkutan perlu melakukan beberapa tahapan sehingga proses yang diharapkan nantinya dapat diwujudkan diantaranya mencoba melakukan angket, questioner sejak dini kepada peserta didik, dan wawancara berkala yang nantinya dalam menjadi catatan dalam penilaian peserta didik di sekolah; melibatkan psikolog, melakukan evaluasi secara berkala, persemester atau pun pertahunnya, melibatkan kalangan professional jika dalam proses peminatan ini dilihat mengalami situasi yang tidak baik. Merdeka Belajar, berarti memerdekaan peserta didik dengan mendidik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga memerdekaan Pendidik atau guru dalam berupaya memberikan asupan ilmu pengetahuan yang tiada terbatas (Hasim, 2020).

Merdeka belajar bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang telah berjalan, tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Merdeka belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Adit memaparkan bahwa penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran tersebut seperti: (1) RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran) yang dibuat oleh guru tidak perlu terlalu banyak dan rumit seperti sebelumnya, (2) sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu tetap dilaksanakan namun lebih luwes dalam pengimplementasiannya, (3) mulai tahun 2021 ujian nasional yang selama ini menjadi beban bagi pelaku pembelajaran diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, dan (4) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dialihkan menjadi asesmen berkelanjutan seperti portofolio (tugas kelompok, karya tulis, praktikum, dan sebagainya). Jika sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian dalam merdeka belajar ini diarahkan pada asesmen berkelanjutan, maka dapat disepakati bahwa asesmen autentik yang pernah diimplementasikan pada kurikulum 2013 masih relevan untuk diintegrasikan dengan program tersebut (Tae & Ngongo, 2022). Tidak hanya itu, instrumen penilaian pun ada yang dikembangkan bahkan di ubah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan output lulusan yang sesuai dengan dunia industri, dunia usaha, persiapan karir di masa mendatang sesuai dengan perkembangan zaman (Lestari et al., 2022).

4. SIMPULAN

Secara umum bahwa dukungan internal maupun eksternal telah terpenuhi namun perkembangan zaman dapat mempengaruhi perubahan Pendidikan. Evaluasi kurikulum memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi kita tidak akan tahu kelemahan

dan kekuatan di dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan. Dan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti halnya ;orang tua, guru, pengembang kurikulum masyarakat,dll. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seefektif mungkin. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah evektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang telah berjalan, tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Merdeka belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Selanjutnya kurikulum MBKM yang merupakan kurikulum terbaru di Indonesia, lebih menekankan proses kegiatan pembelajaran diluar dan didalam kampus. Hal ini dapat diketahui dari pematanan delapan kegiatan pembelajaran yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Agusta, A. R., Lestari, N. C., Suriansyah, A., Nofirman, & Rukhmana, T. (2022). Pendidikan Inspiratif Era Cybernetics (Strategi Menjadikan Iklim Pembelajaran Bermakna di Era Digital). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
<https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.
- Aprima, D., & Sari, S. (2022). Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Matematika SD. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 95–101.
- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 68–74.
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 686–692. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Ineu, S., Teni, M., Yadi, H., Asep, H. H., & Prihantini. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248–8258.
<https://media.neliti.com/media/publications/444639-none-ee780f83.pdf>

- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi literatur: problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar. *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*, 10–15.
<https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>
- Kurniati, P., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya Bagi Siswa Dan Guru Abad 21. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 408–423.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1516>
- Lestari, N. D., Pratiwi, N., Kurniawan, C., Januardi, Aradea, R., Masnunah, Nurlina, Jaya, A., Rohmat, A., & Khotimah, D. K. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Merujuk Pengembangan Kurikulum Abad 21 Di SMK Negeri 1 Sungai Rotan. *Jurnal PKM Ilmu Kependidikan*, 5(2), 12.
- Madhakomala, Aisyah, L., Rizqiqqa, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At- Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172. <https://doi.org/10.55210/attalim.v8i2.819>
- Marisa, M. (2021). CURRICULUM INNOVATION “INDEPENDENT LEARNING ” IN THE ERA OF SOCIETY 5 . 0 Email : miramarisa97@gmail.com. 5(1), 66–78.
<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Nasution, S. W. (2022). Assesment Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. 1, 135–142.
<https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.181>
- Permendikbud. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. In *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI*.
- Tae, M., & Ngongo, A. A. (2022). Pentingnya Teknologi Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022*, 47–52.